
MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR

Nadya Anggara Putri¹, Sutiyo², Ida Yunari³, Agus Supriatna⁴, Irfan Uluputty⁵

^{1,2,3,4} Manajemen Keamanan dan Kesematan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

⁵ Praktik Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: nadyaputri@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Budaya dan keyakinan yang dipercaya oleh masyarakat merupakan kearifan lokal dan menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu masyarakat tradisional yang cukup terkenal di Indonesia yaitu masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Hasil pra survey menunjukkan adanya indikasi memudarnya nilai kearifan lokal pada masyarakat tradisional karena era modernisasi, serta adanya potensi bencana seperti kekeringan akibat perubahan iklim di Indonesia. Berdasarkan indikasi tersebut, Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui risiko bencana dan bagaimana mitigasi bencana berbasis kearifan lokal yang telah dilakukan di Kasepuhan Ciptagelar. Penelitian ini juga mengulas tentang kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana di Kasepuhan Ciptagelar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan Kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa potensi risiko bencana diantaranya yaitu Gempa Bumi, Erosi dan Tanah Longsor, serta Perubahan Iklim. Kearifan Lokal pada Kasepuhan Ciptagelar sudah dapat dikategorikan sebagai media Mitigasi Bencana. Maka, kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal di Kasepuhan Ciptagelar adalah kebijakan yang menerapkan pendekatan partisipatif, bersifat komunal, dan menjadikan kelembagaan dan tokoh adat sebagai motor utama penggerak program di lapangan.

Kata Kunci: *Kearifan Lokal, Mitigasi Bencana, Pengurangan Risiko Bencana*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat memahami cara memperlakukan alam agar dapat tetap berada pada tempat dan kondisi yang semestinya, sehingga alam dapat tetap memberikan manfaatnya kepada manusia. Hal ini dikarenakan alam atau lingkungan dan budaya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat yang sejak dahulu telah dapat menerjemahkan informasi dari berbagai simbol alam yang kemudian menjadi sebuah kepercayaan untuk dapat beriringan dengan alam dan lingkungannya. Dalam hal ini, masyarakat adat memahami betul mengenai kehidupannya sangat amat bergantung pada alam.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan modernisasi, banyak budaya di Indonesia yang sudah mulai memudar dan memicu timbulnya asimilasi budaya, padahal keberagaman seharusnya dapat menjadi identitas bagi setiap daerah dan dengan begitu masyarakat dapat turut berkontribusi dalam isu pembangunan berkelanjutan terkhusus dalam isu kebencanaan (Triastari, Dwiningrum, & Rahmia, 2021). Masyarakat modern semakin mengabaikan kearifan lokal dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang penting dan tidak perlu dirujuk lagi karena peradaban yang semakin berkembang, sehingga hubungan antara alam, tradisi dan manusia menjadi terputus (Agusintadewi, 2016). Pengikisan terhadap budaya dan kearifan lokal juga terbukti dapat menyebabkan peningkatan pembangunan dan akhirnya meningkatkan bencana longsor (Raharja *et al*, 2016). Maka dari itu, kearifan lokal dinilai menjadi hal yang penting dalam mitigasi bencana.

Mitos dalam beberapa wilayah dapat dimanfaatkan sebagai media mitigasi bencana (Supriatin, 2021). Adanya mitos atau legenda yang disertai dengan bukti-bukti empirik, membuat para ahli dapat mempelajari siklus untuk peristiwa-peristiwa alam yang belum atau akan terjadi, seperti peristiwa gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir maupun longsor sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana tersebut (Agusintadewi, 2019). Bentuk upaya penanggulangan bencana di Indonesia menurut (Hutagalung & Indrajat, 2020) paling dominan menggunakan teknologi atau sistem, selanjutnya berbentuk kearifan Lokal, dan yang terakhir

berbentuk pendidikan terkait kebencanaan. Pada akhirnya dalam upaya pemulihan bencana, selain bantuan dari pemerintah masyarakat yang harus berjuang mempertahankan lingkungannya melalui berbagai upaya pemulihan berkualitas disertai dengan budaya dan kearifan lokal yang kuat (Kusumasari & Alam, 2012).

Kasepuhan Ciptagelar, sebagai salah satu masyarakat adat yang sangat menghargai alam dan lingkungannya mengutamakan nilai keberlanjutan kehidupan di masa depan dengan masih menerapkan nilai-nilai adat untuk dapat menjaga alam dan lingkungannya secara tradisional. Kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat adat yang terletak di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan berada di sisi Barat Gunung Halimun. Kasepuhan Ciptagelar dinilai memiliki beberapa budaya yang menjadi simbol keseimbangan alam sebagai upaya pelestarian alam.

Kasepuhan Ciptagelar terletak di wilayah pegunungan dengan kondisi lahan berkelok, menanjak bahkan curam, yang menyebabkan Kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa potensi bencana alam, diantaranya yaitu bencana tanah longsor. Jenis-jenis bencana lain yang paling berpengaruh bagi mereka adalah perubahan iklim, cuaca tidak menentu, kekeringan, kerusakan lahan dan serangan hama yang dapat mengakibatkan kegagalan panen maupun terganggunya sumber-sumber pendapatan mereka. Indonesia sendiri tengah mengalami perubahan iklim hampir di semua wilayah Indonesia terutama di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan Kasepuhan Ciptagelar menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana kekeringan akibat perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kegagalan panen maupun terganggunya sumber-sumber pendapatan mereka.

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kearifan lokal dinilai sebagai sistem kepercayaan masyarakat yang dapat menjadi modal dalam pengurangan risiko bencana melalui pemikiran dan kegiatan turun temurun yang berdampak pada pendidikan dan kegiatan untuk mengurangi risiko terhadap suatu bencana.

Penelitian ini berfokus pada mitigasi bencana berbasis kearifan lokal di Kasepuhan Ciptagelar, berdasarkan potensi risiko bencana serta upaya mitigasi berbasis kearifan lokal yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dirumuskan kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana di Kasepuhan Ciptagelar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, khususnya dengan menggambarkan suatu fenomena dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih supaya penulis dapat lebih mudah untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan menggambarkan secara utuh aktivitas tradisi kearifan lokal di masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Dengan demikian, penulis juga mampu memahami dalam mengkaji bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.

Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis yaitu data primer yang didapat melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan juru bicara masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar, anggota masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar, warga sekitar Kasepuhan Ciptagelar, serta aktivis lingkungan dan kehutanan di wilayah Sukabumi serta data sekunder yang didapat melalui studi literatur yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Risiko Bencana di Kasepuhan Ciptagelar

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa Kasepuhan Ciptagelar yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun memiliki beberapa risiko bencana diantaranya yaitu:

1. Gempa Bumi

Ciptagelar memiliki potensi untuk mendapat guncangan gempa bumi yang disebabkan karena aktivitas sesar, pergerakan lempeng indo australia maupun patahan batuan. Wilayah Kasepuhan Ciptagelar sering kali merasakan gempa bumi

terutama gempa yang terjadi di wilayah kabupaten Sukabumi dan Banten. Meskipun tidak terjadi secara langsung di Kasepuhan, namun gempa bumi tersebut memungkinkan memberikan dampak kepada masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.

2. Tanah Longsor

Kasepuhan Ciptagelar memiliki potensi bencana tanah longsor, namun dengan segala adat dan kepercayaan masyarakat Kasepuhan, mereka mempercayai bahwa bencana longsor selalu “sopan” dengan kata lain, sebelum terjadi longsor yang dapat merusak, tetua adat mendapat mimpi untuk berpindah. Sehingga selama ini, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tidak pernah merasakan dampak bencana longsor yang besar. Dari jenis kontur lahan sendiri, beberapa titik di Kasepuhan Ciptagelar memiliki lahan yang curam, dan curah hujan yang cukup tinggi dapat berpotensi mengalami erosi dan tanah longsor.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim berskala nasional dirasakan oleh masyarakat hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama pulau jawa. Menurut Informasi dari salah satu masyarakat Ciptagelar, biasanya daerah Kasepuhan Ciptagelar merupakan daerah yang cukup tinggi curah hujannya, namun belakang ini, hujan yang terjadi tidak sebanyak dan lama seperti biasanya. Perubahan iklim ini bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua provinsi di Indonesia, namun dampaknya dapat dirasakan oleh hampir semua wilayah termasuk oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dengan prosentase perubahan iklim yang beragam di setiap wilayahnya.

B. Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar

Kearifan lokal merupakan pemikiran, gagasan, atau perilaku turun temurun yang melekat dan menjadi budaya yang dilakukan hingga kini. Geertz (1992) menyatakan kearifan lokal sebagai identitas suatu kelompok yang dipraktekkan oleh suatu masyarakat sebagai jati diri yang melekat pada hukum adat, nilai-nilai budaya, kepercayaan, tata kelola, hingga tata cara dan juga prosedur. Sebagai gagasan dan perilaku yang diturunkan secara turun temurun, kearifan lokal

memiliki fungsi sebagai pengatur dalam kehidupan masyarakat.

1. Kearifan Lokal yang Berwujud Nyata (*Tangible*)

Kearifan lokal *tangible* merupakan kearifan lokal dalam bentuk nilai, adat serta kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun serta memiliki sifat berwujud nyata atau bisa dilihat dengan kasat mata. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat anggota Kasepuhan Ciptagelar, kearifan lokal *tangible* pada masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, diantaranya:

1. Tekstual

Kearifan lokal tekstual merupakan kepercayaan, sistem nilai serta tata cara adat yang dituangkan dalam bentuk tertulis baik di daun, batu, maupun di abadikan dalam primbon atau kalender. Masyarakat Ciptagelar tidak memiliki kearifan lokal dalam bentuk tekstual. Hal ini dikarenakan masyarakat adat kasepuhan merupakan masyarakat yang menganut adat ketimuran, yakni segala sesuatu kepercayaan turun-temurun tidak dituliskan dan disahkan melainkan melalui lisan. Dari lisan ke lisan itulah kemudian menyebar dan membentuk semua kepercayaan yang diyakini bersama hingga saat ini.

2. Struktur Bangunan Pemukiman Kasepuhan Ciptagelar

Struktur bangunan kasepuhan Ciptagelar memiliki struktur khas secara turun temurun. Pada dasarnya struktur bangunan masyarakat kasepuhan Ciptagelar berbentuk rumah panggung yang terdiri atas (1) Atap yang menggunakan material ijuk dan alang-alang; (2) Rangka rumah menggunakan kayu dan bambu untuk dinding; (3) Lantai rumah memiliki 2 versi yaitu ada yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari anyaman bambu; (4) Fondasi rumah menggunakan material batu yang juga digunakan untuk membuat tangga atau tiang-tiang kolong menuju teras atau tepas.

Rumah panggung tidak mengganggu bidang resapan air karena

memiliki "kolong" yang berfungsi mengalirkan udara secara terakhir material ijuk mampu menyerap hawa panas dari radiasi matahari, sehingga suhu di dalam rumah tetap sejuk dan cukup hangat.

3. Pola pengaturan Lahan

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar melakukan zonasi kepada hutan atau lahan, diantaranya yaitu *Leuweung tutupan*, *Leuweung titipan* dan *Leuweung Bukaan*. Dari ketiga zonasi hutan tersebut, hanya *leuweung bukaan* saja yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal juga tempat bertani dan berkebun. Pembagian lahan hutan ini merupakan salah satu adat istiadat turun temurun, yang bermanfaat sebagai pelestarian lingkungan. Selain itu, Bangunan di Kasepuhan Ciptagelar dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu *are* (paling bawah), *siger* (tengah-tengah), dan *leuir* (paling tinggi). Bangunan rumah seringkali tidak berjajar, karena lahan pegunungan yang tidak rata, juga karena adat membagi bangunan menjadi 3 jenis (*Sengkedan*).

2. Kearifan Lokal yang Berwujud Tidak Nyata (*Intangible*)

Kearifan lokal *intangibile* merupakan sebuah adat kepercayaan, nilai, norma dan tata cara yang diwariskan secara turun temurun dan wujudnya tidak dapat dilihat secara langsung. Kearifan lokal *intangibile* masyarakat Kasepuhan Ciptagelar diantaranya:

1. Tradisi

Beberapa tradisi yang masih kental pada masyarakat Kasepuhan Ciptagelar diantaranya yaitu:

- a. Tata cara berpakaian masyarakat yang masih tradisional dimana bagi laki-laki wajib memakai ikat kepala sedangkan untuk wanita memakai kain yang di lilitkan di pinggang. Alasannya yaitu bahwa hidup saling terikat.
- b. Tata cara makan, dimana ketika sedang makan piring harus diletakkan dibawah dan tidak boleh berbicara saat makan.

- c. Masyarakat adat yang menikah dengan masyarakat luar, jika laki-laki wajib kembali ke Kasepuhan Ciptagelar, namun jika wanita boleh tidak kembali, karena hakikatnya wanita wajib mengikuti suami.
- d. Upacara Sereh Taun yang dilakukan setiap tahun merupakan upacara untuk menghormati leluhur serta ungkapan rasa syukur atas panen padi yang telah dilakukan.

2. Larangan Adat

Layaknya masyarakat kasepuhan lain, Kasepuhan Ciptagelar juga memiliki beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat kasepuhan. Larangan tersebut diantaranya (1) Larangan untuk Jual Beli Beras, menjual belikan beras dianggap seperti menjual belikam hidup sendiri, (2) Larangan untuk menggiling beras dengan mesin melainkan memakai menggunakan lesung dan ale, (3) Larangan untuk membangun rumah dengan tembok. Larangan ini berhubungan dengan adanya bencana alam yaitu gempa bumi dan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar mempercayai larangan ini merupakan bentuk kasih sayang para leluhur pada generasinya agar terhindar dari bencana alam yaitu gempa bumi.

3. Hukum Adat

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memercayai dan meyakini 3 hukum, yakni Hukum Negara, Hukum Agama dan Hukum Adat. Dalam Hukum Adat, masyarakat meyakini apa yang ditanam maka itulah yang di tuai. Maksudnya adalah apa yang masyarakat lakukan akan berbalik juga pada dirinya. Jika seseorang berbuat baik maka kehidupannya akan dipenuhi dengan hal-hal baik. Sedangkan bagi masyarakat yang melakukan hal-hal tidak baik seperti mencuri itu sudah pasti akan berbalik kepada dirinya dengan kejadian-kejadian yang dianggap akibat dari perbuatan yang tidak baik tersebut karena itu adalah balasan dari para leluhur

C. Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal di Kasepuhan Ciptagelar

Kearifan lokal tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh terhadap pengurangan risiko bencana. Banyak kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai mitigasi bencana seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.

1. Mitigasi Bencana Struktural

Mitigasi bencana struktural yaitu upaya mengurangi dampak risiko bencana dengan pembangunan sarana maupun prasarana. Berikut merupakan beberapa kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yang dapat dikategorikan menjadi mitigasi bencana struktural, diantaranya yaitu:

1. Rumah Tradisional Khas Sunda Sebagai Mitigasi Bencana Gempa Bumi

Rumah tradisional masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terbukti memiliki struktur konstruksi yang kokoh. Hal ini sudah teruji saat menghadapi bencana gempa bumi, angin maupun beban bangunan itu sendiri. Rumah tradisional yang terbuat dari bambu memiliki keuntungan karena tahan terhadap gempa. Hal ini disebabkan karena bambu memiliki ketahanan terhadap guncangan, memiliki sifat lentur dan juga fleksibel sehingga, ketika terjadi gempa bumi rumah bambu mampu melindungi orang yang ada di dalamnya tanpa menimbulkan korban jiwa (Maryani & Yani, 2014).

Rumah adat yang ditempati sekarang adalah struktur yang khas dan turun temurun. Bahkan ketika mereka berpindah tempat, rangka bangunan itu bisa di lepas kemudian dipasangkan kembali di tempat yang baru dengan beberapa bahan yang masih bisa dipakai, begitu pula dengan perabotan yang ada di dalam rumah. Hal itu membuktikan bahwa struktur dan pola bangunan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar sudah baik dan kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai bangunan yang tahan terhadap Gempa Bumi.

2. Tata Ruang dan Zonasi Penggunaan Lahan sebagai Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Kasepuhan Ciptagelar terletak di kawasan Taman Nasional Gunung

Halimun (TNGH). Dalam persepektif masyarakat adat, hutan di kawasan kasepuhan dibagi menjadi 3 zona wilayah yaitu:

- a. *Leuweung Titipan* merupakan kawasan hutan lindung yang disakralkan oleh masyarakat adat dan tidak boleh dimanfaatkan apapun bentuknya termasuk oleh masyarakat kasepuhan sendiri.
- b. *Leuweung Tutupan* merupakan hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat kasepuhan namun dengan terbatas, seperti pemanfaatan hutan non kayu.
- c. *Leuweung Buka'an/ Garapan* merupakan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kasepuhan baik untuk kawasan pemukiman dan serta ladang untuk bertani dan berkebun.

Pembagian zonasi hutan ini selain bentuk dari kearifan lokal, juga memiliki fungsi agar pengelolaan hutan tidak mengakibatkan banyak kerusakan akibat kebutuhan akan bahan kayu dan bahan alam lainnya. Zonasi hutan ini juga bermanfaat dalam pelestarian hutan.

Kontur lahan di Ciptagelar memiliki curam dan rawan longsor pada beberapa titik, maka dalam pencegahan bencana longsor masyarakat kasepuhan Ciptagelar bertani dengan sistem ladang di huma (tanah kering). Huma merupakan salah satu cara untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Hal ini karena jika dibuat sistem pertanian basah atau sawah, maka lapisan tanah yang subur akan mudah terkikis karena berat lapisan tanah akan semakin berat karena menahan air lebih lama dan jika terdapat lereng dapat mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Selain itu masyarakat memanfaatkan geobang dan menyusunnya dengan pola terasering (bertumbuk) untuk mencegar erosi dan tanah longsor di setiap titik lokasi yang curam. Maka dapat disimpulkan bahwa tata ruang dan zonasi penggunaan lahan oleh masyarakat Ciptagelar dapat dijadikan sebagai mitigasi dalam bencana tanah longsor.

2. Mitigasi Bencana Non Struktural

Mitigasi bencana non struktural dapat diartikan sebagai upaya mengurangi risiko bencana melalui kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelatihan dan pendidikan masyarakat sebagai bentuk peningkatan kapasitas masyarakat (Eviany & Sutiyo, 2023).

1. Kesiapsiagaan Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar

Kesiapsiagaan merupakan upaya antisipasi terhadap bencana dengan koordinasi berbagai sumber daya (Eviani & Sutiyo, 2023). Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memiliki kesiapsiagaan yang baik terhadap berbagai bencana, diantaranya yaitu (1) semua masyarakat sudah mengetahui risiko bencana di sekitar Kasepuhan Ciptagelar; (2) Adanya pembagian zonasi hutan (3) Menjaga air tetap mengalir dan sumber bahan pangan tetap melimpah meskipun terjadi kekeringan atau gagal panen yang dijaga oleh rorokan maritim dan rorokan pamakayaan; (4) beberapa rumah memiliki “*kentongan*” yang dapat digunakan sebagai alat peringatan dini atau *early warning system* (EWS).

2. Kapasitas masyarakat melalui Kearifan Lokal dalam Ketahanan Pangan sebagai Mitigasi Bencana Kekeringan dan Perubahan Iklim

Pertanian bagi masyarakat kasepuhan Ciptagelar menjadi ritual adat yang sangat sakral dan memiliki aturan adat tersendiri. Istilah yang diyakini oleh masyarakat yaitu *mupusti pare, lain migusti* artinya memuliakan padi tapi tidak menuhankan padi. Tradisi menanam padi yang dilakukan setahun sekali dengan perhitungan rasi bintang, sukses membuat masyarakat hampir tidak pernah gagal panen. Selain itu, tradisi menyimpan hasil panen di *leuit* membuat stok padi Masyarakat sangat banyak. Menurut informasi tokoh adat stok padi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar cukup hingga 90 tahun menghadapi bencana kekeringan.

Hal ini merupakan ketahanan pangan bagi masyarakat kasepuhan. Mereka tidak merasa khawatir takut akan kesulitan makan. Bahkan jika terjadi perubahan iklim yang membuat mereka gagal panen maupun datangnya

bencana kekeringan, masyarakat memiliki banyak persediaan bahan pangan utama (padi) yang membuat masyarakat tidak pernah risau meskipun terjadi perubahan iklim dan kekeringan yang panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian Gantini (2015) yang menyebutkan bahwa kearifan lokal berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dengan kata lain, menyimpan padi di *leuit* sama dengan mitigasi melalui ketahanan pangan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

3. Harmonisasi Hukum Adat dan Pemerintah untuk Mencegah Kerusakan dan Penebangan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Alam

Banyaknya kebutuhan akan kayu baik untuk pemanfaatan pribadi ataupun komersil menyebabkan terjadinya perusakan hutan dan penebangan liar. Dalam Hukum Adat yang dipercayai masyarakat sebagai timbal balik atas perilaku Masyarakat, maka jika ada masyarakat yang menebang hutan sembarangan harus menanam 1000 bibit pohon pengganti. Namun jika penebangan itu terus menerus dilakukan, sebagai bentuk penghukuman masyarakat adat yaitu mencoret nama pelaku dari *incu pitu* (hubungan keluarga anak dan cucu) hingga dikucilkan.

Pemerintah sendiri telah mengatur penebangan liar ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar sangat meyakini adanya hukum timbal balik, dimana ketika seseorang menebang pohon dengan sembarangan dan tidak mengikuti aturan, maka akan ada hukuman setimpal sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan. Bagi masyarakat setempat atau oknum luar yang melakukan penebangan pohon ilegal dan terbukti bersalah oleh masyarakat maka ia akan dikenai hukum adat.

Adanya harmonisasi mengenai Hukum Adat dan Hukum Negara yang dipatuhi oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dapat menjaga keseimbangan

alam dan mencegah terjadinya bencana-bencana alam yang akan timbul akibat kerusakan alam seperti erosi tanah longsor, berkurangnya aliran air hingga hilangnya resapan air yang menimbulkan banjir.

D. Kebijakan yang diperlukan untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kasepuhan Ciptagelar

1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Saat ini

Ditilik dari visi misi Kabupaten dan Kecamatan, pemberdayaan pada Kasepuhan Ciptagelar secara normatif sudah mengarah pada proses partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam program-program pemerintah, memperkuat penerapan kearifan lokal dan pelestarian eksistensi Masyarakat kasepuhan. Sayangnya, kebijakan tersebut kurang terealisasi ke Masyarakat Kasepuhan. Di sisi lain, perangkat pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan juga mengakui bahwa jarak kasepuhan yang berada di puncak gunung dan berada di tengah Kawasan hutan telah menyulitkan program pemerintah untuk diselenggarakan. Hal-hal administratif yang biasanya dipersyaratkan oleh birokrasi pemerintah dalam implementasi satu program juga sulit dipenuhi di Kasepuhan.

Pada saat yang sama, seringkali terdapat perbedaan pandangan nilai dan hukum antara pemerintah dan masyarakat kasepuhan. Contoh nyatanya berkaitan dengan pengelolaan hutan, dimana menurut Perhutani terdapat oknum masyarakat yang dianggap merusak hutan lindung yang ada dalam Kawasan gunung Halimun. Sedangkan menurut penuturan warga, apa yang mereka lakukan sudah sah menurut hukum adat dan mereka sendiri dalam pengelolaannya mengakui bahwa selalu menerapkan tebang-tanam, yakni tidak hanya sembarang menebang pohon, tetapi juga mereka menanam lebih banyak pohon setelahnya. Hanya saja pengakuan masyarakat ini kurang didengar oleh aparat, karena seringkali mereka ditunggangi oleh pencuri kayu illegal.

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, program-program pemerintah kepada masyarakat adat Ciptagelar lebih cenderung bersikap reaktif

dan kurang maksimal dalam implementasi. Bahkan menurut juru bicara Kasepuhan Ciptagelar, banyak program yang digaungkan pemerintah sejak era orde baru kepada warga, namun program tersebut lebih banyak terdengar gemanya saja. Implementasi program dan sasarannya, dapat dikatakan tidak pernah menysar kepada masyarakat. Lebih lanjut disampaikan program pemerintah itu baru sebatas membantu rehabilitasi bangunan adat dan kebijakan tersebut terlaksananya beberapa tahun terakhir ini.

Ide-ide program yang dibawa oleh politisi juga masih terbatas pada sosialisasi, sehingga hal ini kemudian menurunkan minat masyarakat untuk turun aktif dalam program pemberdayaan yang belum jelas anggarannya. Tidak hanya dari politisi semata, dari pemerintah pusat maupun daerah selama ini belum terlalu menargetkan kasepuhan sebagai subjek utama dalam program pemerintah di bidang pemberdayaan maupun manajemen kebencanaan.

Implementasi kebijakan yang minimal inilah yang kemudian membuat warga cenderung lebih mandiri. Demikian juga dalam upaya pengurangan risiko bencana, dimana mereka lebih mengandalkan kemampuan mereka dibandingkan dengan berharap dari program pemerintah.

Rendahnya minat warga dalam program pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh jajaran Kasepuhan. Bagi mereka, merasa cukup dan bersyukur adalah kunci ketenangan dan kebahagiaan hidup. Mereka juga percaya bahwa menggantungkan diri adalah cukup kepada Yang Maha Kuasa, bukan kepada makhluk. Sehingga dari era awal pendirian kasepuhan hingga sekarang, mereka tidak pernah meminta dana atau mengajukan proposal ke pemerintah atau organisasi sosial lainnya.

Namun, realisasi program pemerintah yang jauh dari harapan tidak pernah menurunkan kapasitas masyarakat adat kasepuhan untuk berjuang secara mandiri, termasuk dalam mencegah dan menangani kejadian bencana. Justru ketika bantuan dari pemerintah minim, mereka kemudian berusaha secara pribadi untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui swadaya masyarakat maupun

gotong royong.

Dari awal kasepuhan ini ada, masyarakat kasepuhan dikenal sebagai komunitas yang mandiri, tanpa ketergantungan kepada pihak lain. Dalam keluarga Kesatuan Adat Banten Kidul, bahkan jarang terdengar gagal panen, hama menyerang, dan atau kabar tentang kekurangan pangan, apalagi hingga kelaparan. *Leuit* mereka kabarnya bahkan tidak pernah kosong sepanjang tahun. Bahkan ketika kami menanyakan harapan masyarakat pada berbagai program dan kebijakan yang gencar diterapkan di berbagai daerah, masyarakat adat cenderung menanggapi dengan santai. Bagi mereka, status mereka sudah berdaya, mandiri, dan mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam pengurangan risiko bencana.

Seiring juga dengan pergantian pemerintahan baru yang lebih peka terhadap aspirasi warga, kini masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar mulai diikuti dalam berbagai program pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, meski sudah melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasinya, beberapa program masih perlu sosialisasi dan melibatkan ketua adat serta kelembagaannya secara menyeluruh.

Tidak hanya pihak pemerintah saja yang menawarkan program pemberdayaan, dari pihak swasta, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, dan perusahaan profit juga menggandeng kasepuhan untuk menjalankan program *Corporate Service Responsibility/CSR*nya. Dari penuturan perwakilan Ciptagelar, dua perusahaan yang sukses menjalankan programnya antara lain Telkomsel dan Bank Mandiri. Telkomsel membantu warga dalam penyediaan ambulans (dengan roda khusus), sedangkan Bank Mandiri membantu warga membangun turbin di beberapa titik desa. Dalam implementasi program tersebut, warga diajak untuk mendesain dan turut memberikan saran dalam eksekusinya di lapangan. Pendekatan tersebut justru lebih berhasil dalam menarik simpati masyarakat, sehingga antara target dan realisasi program terdapat kesesuaian.

Mengenai kendala tersebut, perwakilan dari struktur kelembagaan

Kasepuhan Ciptagelar menyatakan bahwa ketika program yang dibawa tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya adat yang dianut warga, program tadi akan tercampakkan dengan sendirinya. Walaupun pada awal pencaangan, terlihat beberapa warga yang turut serta, tapi untuk ukuran jangka panjang belum dapat dijamin kelangsungannya.

2. Esensi Kebijakan yang Diperlukan

Mitigasi bencana berbasis kearifan lokal perlu terus dilakukan sebagai strategi utama pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Kebijakan pemerintah menjadi sebuah instrumen penting pelestarian kearifan lokal di Kasepuhan Ciptagelar. Sudah semestinya kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah di tengah masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tidak melupakan identitas budayanya, yakni kearifan lokal yang dimiliki. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fokus program pemerintah di bidang apapun adalah tidak menjadikan masyarakat sebagai objek, tetapi menjadi subjek atau partisipan aktif. Menilik persepsi dan evaluasi program yang telah dijalankan, perlu kemudian menyusun langkah dan strategi implementasi kebijakan yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan.

Kebijakan apapun yang terkait dengan pengurangan risiko bencana di Kasepuhan Ciptagelar perlu menerapkan pendekatan yang terarah, partisipatif, dan cenderung komunal. Program yang ada bukan bertujuan untuk membuat masyarakat adat menjadi lebih tergantung kepada pemerintah, namun bagaimana membuat masyarakat meningkat kapasitasnya dengan menempatkan kelembagaan adat sebagai penggerak dalam setiap Upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, kebijakan yang dibutuhkan harus mencakup peningkatan kapasitas aparatur dalam kelembagaan adat, pemetaan, dan analisis sosial bagi pemegang jabatan dalam struktur kelembagaan serta warga lokal secara umum.

Di masa mendatang, pemerintah sebelum menerapkan kebijakan juga perlu datang dan melakukan musyawarah terlebih dulu dengan kelembagaan adat terkait apa yang diperlukan oleh masyarakat dan apa saja kesulitan/hambatan yang akan

dihadapi. Tujuannya supaya sedari perencanaan program sudah termasuk tindakan preventif yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan pengurangan risiko bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa potensi risiko bencana diantaranya yaitu Gempa Bumi, Erosi dan Tanah Longsor, serta Perubahan Iklim.
2. Kearifan Lokal pada Kasepuhan Ciptagelar dapat dikategorikan sebagai Mitigasi Bencana. Berikut lebih jelasnya:
 - a. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memiliki Kearifan lokal *tangible* dan *intangible*. Dimana Kearifan lokal *tangible* terdiri dari struktur bangunan yang khas serta pola pengaturan lahan yang turun temurun, namun masyarakat tidak memiliki kearifan tekstual karena menganut adat ketimuran yang mewariskan nilai dan tata cara adat melalui lisan. Untuk kearifan lokal *intangible* terdiri dari tradisi, larangan adat dan hukum adat yang masih dilakukan hingga saat ini.
 - b. Mitigasi bencana yang berhubungan dengan kearifan lokal terdiri dari mitigasi struktural dan non struktural. Untuk mitigasi struktural terdiri dari Rumah Adat Khas Sunda yang dapat dikategorikan sebagai Mitigasi Bencana Gempa Bumi, Pengaturan Lahan dan zonasi hutan sesuai dengan ketentuan adat dapat dikategorikan sebagai mitigasi bencana Erosi dan Tanah Longsor, serta adanya Harmonisasi hukum adat dan pemerintah dalam mencegah kerusakan hutan sebagai simbol keselarasan Alam. Selanjutnya mitigasi Non Struktural terdiri dari kesiapsiagaan masyarakat serta mitigasi bencana kekeringan dan perubahan iklim melalui kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan (pengelolaan padi).

3. Kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal di Kasepuhan Cioptagelar adalah kebijakan yang menerapkan pendekatan partisipatif, bersifat komunal, dan menjadikan kelembagaan dan tokoh adat sebagai motor utama penggerak program di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusintadewi, N. K. (2016). Memaknai Kembali Kearifan Lokal dalam Konteks Kekinian. *Prosiding Seminar Nasional Tradisi dalam Perubahan: Arsitektur Lokal dan Rancangan Lingkungan Terbangun* (pp 461-465). Denpasar: Universitas Udayana
- Eviany, Eva., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. Klaten: Nasmedia.
- Gantini, Tuti. (2015). Kearifan Lokal Dalam Metode Pengukuran Ketahanan Pangan (*Local Wisdom of Measurement Food Security Method*). *Majalah Ilmiah Unikom*. 13 (2).
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius Press.
- Hutagalung, S. S., & Indrajat, H. (2020). Adoption Of Local Wisdom In Disaster Management In Indonesia. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 9(3).
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Local Wisdom-Based Disaster Recovery Model in Indonesia. *Disaster Prevention and Management*, 21(3), 351-369.
- Maryani, E., & Yani, A. (2014). Kearifan Lokal Masyarakat Sunda Dalam Memitigasi Bencana. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(2).
- Raharja, R., Wibowo, F. G., Ningsih, R. V., & Machdum, S. V. (2016). Peran Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana: Studi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Longsor di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 7(2).
- Sinurat, Natan., Sari, Legian., Simanjuntak, Frisky Agnes., & Solahudin, Amir. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Illegal Logging Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 4 (1). <https://doi.org/10.36418/jiss.v4i1.766>.
- Supriatin, Y. M. (2021). Menafsirkan Mitos Sebagai Media Mitigasi Bencana di Masyarakat Sunda. *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat* (pp. 385-394). Balai Arkeologi Jawa Barat.
- Triastari, I., Dwiningrum, S. I., & Rahmia, S. H. (2021). Developing Disaster Mitigation Education with Local Wisdom: Exemplified in Indonesia Schools. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.